

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung dan pembahasan yang peneliti lakukan dalam bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rumusan masalah pertama yaitu “seberapa besar kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan sektor publik” telah terjawab. Berdasarkan uji regresi sederhana yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan sektor publik sebesar 35.3 % dan sisanya sebesar 63.7% dipengaruhi oleh faktor lainnya.
2. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kadek dkk (2014) yaitu kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
3. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan fenomena yang terjadi, seperti yang diungkapkan oleh Rizal (2007) “Untuk menerapkan akuntansi *double entry* berbasis akrual diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang memahami logika akuntansi secara baik. Aparatur pemda yang menangani masalah keuangan tidak cukup hanya menguasai penatausahaan anggaran, melainkan juga harus memahami karakteristik transaksi yang terjadi dan pengaruhnya pada rekening-rekening dalam laporan keuangan pemda.”

5.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan di atas penulis mencoba mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya hendaknya memperluas sampel penelitian, tidak hanya pada satuan kerja perangkat daerah saja melainkan dengan badan-badan atau unit pemerintahan lainnya sehingga penelitian dapat lebih tergeneralisasi
2. Hasil uji regresi sederhana menunjukkan masih ada variabel-variabel lain yang harus diperhatikan dalam penelitian ini. Peneliti-peneliti selanjutnya disarankan menambah variabel lain untuk mengetahui variabel yang mempengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan sektor publik.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan teknik pengumpulan data yang lain selain yang dilaksanakan oleh peneliti, karena seperti yang diuraikan oleh Sri Mulyani (2009), LKPD yang memperoleh opini disclaimer pada 2004 tercatat tujuh daerah dan naik menjadi 14 daerah di 2008, sehingga diharapkan faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kualitas pelaporan keuangan dapat diketahui.

Demikian saran yang bisa penulis berikan, semoga saran-saran tersebut dapat berguna bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung maupun peneliti selanjutnya yang ingin menguji faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan sektor publik.